



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : WAHYU WIDIYATMI
- 2. Jabatan : KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH
- 3. NHK : 801676

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 3.797.500.000

- 1. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/60 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- 2. Tanah Seluas 3605 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
- 3. Tanah Seluas 6035 m2 di SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 603 m2/300 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
- 5. Tanah Seluas 873 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 436.500.000
- 6. Tanah Seluas 872 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 436.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 124.600.000

- 1. MOBIL, TOYOTA COROLA SEDAN Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- 2. MOTOR, YAMAHA - Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
- 3. MOTOR, HONDA C100 Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- 4. MOBIL, TOYOTA KIJANG SPR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
- 5. MOBIL, MARCEDES E230 CLASSIC MT Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



6.	MOTOR, HONDA C100 Tahun 1991, HASIL SENDIRI	Rp.	1.600.000
7.	MOTOR, HONDA ACF1L21B06 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	8.500.000
8.	MOTOR, HONDA F1CD2N28LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	10.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	44.671.800
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	3.972.771.800
III.	HUTANG	Rp.	1.300.079.482
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.672.692.318

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.